

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA TAMAN WISATA MARGASATWA MANGKANG SEMARANG

Tri Yuniningsih¹

Abstract

UPTD Taman Margasatwa formed based on the mayor 68 Semarang number of 2008 , instability visitors is a phenomenon is interesting to check management has be done by the city Semarang and of tourism city sernarang in its management in support of progress tourism and urban development Semarang be increased .In this research focused on the study of analysis policies that have been done by of tourism and culture Semarang city especially tourism park mangkang marga animals , where in the management of taman Margasatwa Mangkang Semarang city not maximum .Research aim is to identify the problem is in tourism taman Margasatwa Mangkang Semarang city especially with regard to the physical aspects , formulate alternative policies of physical problems faced by tourism taman Margasatwa Mangkang Semarang city and give recommendations for alternative.

From our observation in the field problems found was there is a lack of physical infrastructure, lack of how dare socialization and promotion, the limited budget from the government, still relatively low human resources / personnel, there is a lack of quantity human resources, the limited performance employees, duplicate work, there is no special security officers in the game, there is a lack of the trash, park did not yet have good, job desk employees who are clear, that has not been the management of zoo mangkang, still low public participation / visitors in maintaining healthy, income have not reached a designated target. Formulation alternative policies that is recommended after conducted stage weighting and scoring, so three alternative policies delivered the coordination with third party private and, improvement of infrastructure, and changes of form the uptd to other forms.

In order to overcome problems , so the management tourism taman Margasatwa Mangkang Semarang city must be responsiveness and responsive to everything possible , so that we can remain in existence and could be an icon tourism in central java , continuously improve cooperation with all parties concerned in order to attract tourists , local as well as foreign .As with big investors / private , travel agencies and hotels and mass media , improvement of infrastructure in the tourist attraction taman Margasatwa Mangkang Semarang city , that have attraction , security and visitors .

Keywords : *policy analysis, managing, Mangkang Zoo*

¹ Staf Pengajar Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP - Undip

PENDAHULUAN

UPTD Taman Margasatwa dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Margasatwa Kota Semarang. UPTD Taman Margasatwa Mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Bidang Pengelolaan dan memberikan pelayanan obyek Taman Margasatwa. Ketidakstabilan pengunjung adalah suatu fenomena yang menarik untuk diteliti, pengelolaan Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang belum maksimal untuk meningkatkan daya tarik. Gejala ini dapat dilihat dari minimnya koleksi hewan yang ada, sarana prasarana taman ini juga tidak layak. Kurangnya pengelolaan sarana dan prasarana kandang misalnya masih terdapat kondisi kandang yang sudah mengalami karatan, infrastruktur yang kurang diperhatikan menyebabkan kerusakan, kurangnya kebersihan di dalam areal Taman Margasatwa, masih banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan terutama sampah plastik yang dapat membahayakan hewan dan merusak lingkungan. Oleh karena itulah untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan suatu kebijakan Pengelolaan tempat wisata yang mampu memajukan Taman Margasatwa Mangkang ini supaya nantinya lebih baik dalam pengelolaannya. Mencermati beberapa permasalahan yang ada di lapangan, mendasari minat dan perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengidentifikasi masalah yang ada di obyek wisata Taman Margasatwa Mangkang kota Semarang terutama yang berkaitan dengan aspek fisik; Merumuskan alternatif kebijakan mengenai permasalahan fisik yang dihadapi obyek wisata Taman Margasatwa Mangkang kota Semarang; dan Memberikan rekomendasi terhadap alternatif kebijakan yang terbaik dan menguntungkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian; penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif karena bersifat pengungkapan fenomena-fenomena secara deskriptif tanpa mempertimbangkan kuantitas kemunculan fenomena, tetapi kedalaman informasi pada setiap fenomenanya. Fokus dan lokus penelitian: penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan pengelolaan TMM di Kota Semarang. Sumber data; data primer diperoleh dan informan utama, yakni Kepala UPTD Obyek Wisata (Pengelola) Taman Marga Satwa Mangkang Kota Semarang, PKL sekitar TMM dan Pengunjung, sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, media elektronik, dan sumber lain yang dapat dijadikan sumber informasi. Teknik koleksi data; pengumpulan data dilakukan dengan *Wawancara* . Teknik penentuan informan adalah *Purposive*, untuk pengelola dan accidental pada saat dengan pengunjung. Analisis dan interpretasi data; data disajikan dengan teknik naratif dan dianalisis dengan teknik taksonomi. Kualitas penelitian (goodness criteria); penelitian ini diharapkan dapat memperoleh keunggulan dalam hal tema belum banyak dibahas di Jurusan Administrasi Publik FISIP UNDIP, menggunakan teknik yang memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga informasi dapat lebih kaya, Kelemahan / keterbatasan penelitian : karena belum banyaknya referensi dalam tema ini, Referensi masih banyak yang terbitan lama.

PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Data

Deskripsi Kebijakan Pengelolaan Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 2015 Tambahan Lembaran Daerah

Kota Semarang Nomor 22). Organisasi dan tata kerja UPTD Taman Margasatwa Mangkang Semarang sebagai salah satu UPTD Kota pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun UPTD Taman Margasatwa mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengelolaan dan memberikan pelayanan obyek Taman Margasatwa. Salah satu ikon Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang adalah para pengunjung yang berminat berfoto dengan satwa, bisa dilakukan di anjungan foto. Pengunjung dapat berfoto dengan satwa seperti burung beo, ular dan satwa lain. Foto tersebut dapat dipakai sebagai kenang-kenangan dengan kontribusi Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk sekali foto. Dari hasil wawancara dengan Bapak Toeloes Budi seorang koordinator satwa, mengatakan bahwa pemasukan keuangan untuk taman margasatwa, selain dari penjualan tiket masuk juga dari sumber lain, seperti dari kontribusi foto, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) masuk kas taman margasatwa, yang Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) menjadi milik jasa foto yang telah bekerjasama dengan pihak taman margastwa. Selain itu pemasukan bisa diperoleh dari kotak toilet, sewa lahan yang digunakan untuk warung dan kios.

Formulasi hasil kebijakan

Setelah dilakukan penelitian maka permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Hasil Formulasi Masalah Kebijakan

No.	Hardware	Software	Manusia Pelaku
1	Sarana dan prasarana fisik	Sosialisasi dan promosi	Kemampuan SDM/personil
2	Tempat sampah	Anggaran dari pemerintah	Kuantitas SDM
3	Penataan taman	Duplikasi pekerjaan	Performance pegawai
4	Keragaman jenis satwa dan jenis permainan	Job desk pegawai	Petugas keamanan
5	Penerangan	Manajemen pengelolaan taman margasatwa mangkang	Partisipasi masyarakat/pengunjung
6	Akses jalan	Pendapatan belum mencapai target	

No.	Hardware	Software	Manusia Pelaku
7	Pelayanan	Keamanan	
8	Tempat paker	Kenyamanan	
9	Toilet dan mushola	Kerjasama dg pihak ketiga	

Sumber : hasil wawancara, 2015

Menentukan Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Tujuan dari kebijakan pengelolaan obyek wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang adalah dalam upaya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan salah Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Semarang.

Tabel 2
Wahana dan Harga Tiket

No.	Wahana	Harga tiket
1	Pintu Utama	Rp. 5.000
2	Becak Air	Rp. 5.000
3	Bendi Wisata	Rp. 5.000
4	Kereta Wisata	Rp. 3.000
5	Naik Gajah	Rp. 5.000
6	Naik Kuda	Rp. 5.000
7	Naik Perahu Motor	Rp. 3.000
8	Flying fox	Rp. 10.000
9	Tiket Lebaran	Rp. 7.500
10	Water boom	Rp. 10.000
11	Film satwa	Rp. 3.000

Sumber data : 2015

Berdasarkan kondisi umum, eksisting, analisis sosial dan evaluasi terhadap pengelola Kebun Binatang Taman Margasatwa Mangkang, terdapat beberapa pengelolaan yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka optimalisasi kebun binatang Mangkang. Sebagai Taman rekreasi, konservasi dan edukasi, maka bonbin Mangkang masih sangat perlu dikembangkan. Sebagai Taman rekreasi perlu penambahan wahana bermain dan atraksi wisata, Sebagai Taman konservasi perlu penambahan koleksi satwa. Sebagai taman pendidikan perlu sentuhan teknologi dan peragaan edukasi, yaitu dengan penambahan alat-alat dan perluasan lahan kalau memungkinkan. Untuk melakukan pengembangan tersebut perlu penataan ulang lahan., bentuk manajemen dan organisasi pengelola dan perlu penambahan dana yang cukup besar atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Mengidentifikasi Parameter Kebijakan

Empat keterbatasan yang pasti dihadapi pada waktu mendesain kriteria kebijakan, yaitu:

- a. *Technical feasibility*, yaitu mengukur apakah kebijakan mencapai tujuannya. Model ini menggunakan pendekatan *best practices* dan membuat komparasi terhadap *best practices* tersebut. Berkaitan dengan keterbatasan ini maka kebijakan tentang pengelolaan obyek wisata TMM di kota Semarang masih belum optimal.
- b. *Political viability*, yaitu mengukur apakah kebijakan memberikan dampak yang relevan pada kekuatan- kekuatan politik, seperti pembuat kebijakan, legislator, koalisi warga Negara, dan aliansi-aliansi politik lain. Kriteria yang dipergunakan adalah akseptabilitas (*acceptability*), ketepatan (*appropriateness*), kepekaan (*responsiveness*), dukungan hukum (*legality*), dan keadilan (*equity*). Kebijakan yang telah ada berdasarkan hasil penelitian belum memberikan dampak yang relevan, hal ini bisa dilihat dari akseptabilitas, ketepatan, kepekaan, dukungan hukum dan keadilan yang belum maksimal.
- c. *Economic and financial possibility* berkenaan dengan biaya dan manfaat ekonomi dan kebijakan. Dari criteria ini berdasarkan kebijakan yang telah ada juga belum memberikan biaya dan manfaat ekonomi dan kebijakan yang belum maksimal.
- d. *Administrative operability* berkenaan dengan implementabilitas kebijakan dalam konteks politik, sosial, dan administrasi atau birokrasi. Kriteria disini berkenaan dengan kewenangan (*authority*), komitmen kelembagaan (*institutional commitment*), kemampuan (*capability*), dan dukungan organisasional (*organizational support*). Dilihat dari kriteria ini juga belum maksimal.
- e. *Environment commitment* / Komitmen pada lingkungan. Selama ini, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan terlihat dari

semakin menurunnya daya lingkungan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakan hukum lingkungan secara konsisten masih belum optimal.

Mencari Alternatif Kebijakan

Untuk menyusun alternatif kebijakan dalam kajian ini dilakukan dengan memadukan dan memodifikasi kebijakan pengelolaan Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang yang telah ada. Setelah dilakukan kegiatan tersebut secara terbatas terhadap kebijakan yang ada, diperoleh hasil sebagai berikut :

Alternatif I : Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga/swasta

Alternatif II : Perbaikan sarana dan prasarana obyek wisata TMM

Alternatif III : perubahan bentuk UPTD ke bentuk lain

Tabel 3
Alternatif-Alternatif Kebijakan Pengelolaan Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang

Kriteria	Alternatif Kebijakan		
	I	II	III
	Menjalin Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Perbaikan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata TMM	Perubahan Bentuk UPTD ke Bentuk Lain
Technical feasibility			
Tingkat Efektivitas	Tinggi (3)	Sedang (2)	Rendah (1)
Tingkat Efisiensi	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Political viability			
Partisipasi masyarakat	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Legality	Sedang (2)	Tinggi (3)	Rendah (1)
Responsiveness	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Equity	Tinggi (3)	Sedang (2)	Rendah (1)
Ketepatan	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Economic And Financial Possibility			
Cost	Rendah (1)	Tinggi (3)	Sedang (2)
Benefit	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Administrative operability			

Kriteria	Alternatif Kebijakan		
	I	II	III
	Menjalin Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Perbaiki Sarana dan Prasarana Obyek Wisata TMM	Perubahan Bentuk UPTD ke Bentuk Lain
Kewenangan	Tinggi (3)	Sedang (2)	Rendah (1)
Komitmen Lembaga	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Kemampuan	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Dukungan Organisasional	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)
Environment commitment	Tinggi (3)	Rendah (1)	Sedang (2)

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Pembobotan Dan Penilaian Terhadap Tujuan Dan Kriteria Dari Alternatif-Alternatif Kebijakan

Kriteria	Bobot	Alternatif Kebijakan		
		I	II	III
		Skor x Bobot	Skor x Bobot	Skor x Bobot
Technical feasibility				
Tingkat Efektivitas	10 %	0,30	0,20	0,10
Tingkat Efisiensi	10 %	0,30	0,10	0,20
Political viability				
Partisipasi masyarakat	10 %	0,30	0,10	0,20
Legality	5 %	0,10	0,15	0,5
Responsiveness	5 %	0,15	0,5	0,10
Equity	5 %	0,15	0,10	0,5
Ketepatan	10 %	0,30	0,10	0,20
Economic And Financial Possibility				
Cost	10 %	0,10	0,30	0,20
Benefit	10 %	0,30	0,10	0,20
Administrative operability				
Kewenangan	5 %	0,15	0,10	0,5
Komitmen Lembaga	5 %	0,15	0,5	0,10
Kemampuan	5 %	0,15	0,5	0,10
Dukungan Organisasional	5 %	0,15	0,5	0,10
Environment commitment	5 %	0,15	0,5	0,10
Total	100 %	2,75	1,50	1,75

Ket : bobot sesuai dengan tabel 3.3

Memutuskan Alternatif Kebijakan Yang Terbaik

Dari rekapitulasi hasil pembobotan terhadap setiap alternatif kebijakan sebagaimana ditunjukkan tabel di atas dapat disusun rangking alternatif kebijakan sebagai berikut : rangking pertama alternatif I dengan jumlah nilai tertinggi 2,75; rangking kedua alternatif III dengan jumlah nilai 1,75; dan rangking ketiga alternatif II dengan jumlah nilai 1,50.

Rekomendasi

Berdasarkan perhitungan skor dan bobot pada tabel di atas, maka dipilih alternatif kebijakan pertama yaitu Kerjasama Dengan Pihak Ketiga/Swasta. Dimana alternatif tersebut yang dianggap paling rasional dan berkesesuaian dengan tujuan kebijakan dibanding alternatif lainnya. Oleh karena itu alternatif kebijakan yang **akan direkomendasikan** berdasarkan nilai kumulatif tertinggi dan paling menguntungkan adalah Kerjasama Dengan Pihak Ketiga/Swasta.

Rencana Implementasi Kebijakan

Agar alternatif kebijakan yang direkomendasikan ini dapat berjalan baik dalam implementasinya, maka perlu dikemukakan beberapa langkah aksi sebagai rencana implementasi kebijakan. Langkah aksi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah Daerah perlu menyampaikan permasalahan yang terjadi ini kepada DPRD. Kebijakan ini akan cukup menguntungkan bagi Pemerintah Kota Semarang secara cukup signifikan, selain itu juga akan memberikan keuntungan kepada bagi warga Kota Semarang.

Kedua, Pemerintah Kota Semarang perlu menyikapi dengan positif dan *good will* untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak ketiga/swasta dalam rangka pengelolaan obyek wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang.

Ketiga, Pemerintah Kota Semarang harus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh instansi terkait dalam rangka pengembangan sektor pariwisata.

Keempat, Mengingat letak kota Semarang yang strategis sebagai ibukota propinsi maka pihak Pemerintah Kota Semarang perlu berkoordinasi dan melakukan pendekatan kepada pemerintah kabupaten sekitar demi terbentuknya Forum Kerjasama Antar Daerah (*interlocal networking*), sehingga tercipta kerjasama di sektor pariwisata di Jawa Tengah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang ada di Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang dapat dikategorikan ke dalam tiga komponen, yaitu : *hardware, software, dan brainware*.
- b. Rumusan alternatif kebijakan yang direkomendasikan setelah dilakukan tahapan pembobotan dan scoring, maka dari tiga alternatif kebijakan yang disampaikan yaitu kerjasama dengan pihak ketiga/swasta, perbaikan sarana dan prasarana, dan perubahan bentuk UPTD ke bentuk lain.
- c. Rekomendasi yang disampaikan adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/swasta dalam rangka pengembangan Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang.

Saran

- a. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka pihak pengelola Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang harus segera tanggap dan responsive terhadap segala kemungkinan, sehingga bisa tetap eksis dan bisa menjadi ikon pariwisata di Jawa Tengah.
- b. Terus meningkatkan kerjasama dengan semua pihak terkait dalam rangka menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Seperti dengan investor besar/swasta, biro perjalanan dan perhotelan serta media massa.
- c. Perbaikan sarana dan prasarana di Obyek Wisata Taman Margasatwa Mangkang Kota Semarang, sehingga menambah daya tarik, keamanan dan kenyamanan pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Muffin Company.

Abdul,Solichin,2003.*Analisis Kebijaksanaan Edisi Kedua*.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dunn. William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Gajah Mada University Press.

Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Riset*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Kismartini,2007.*Analisis Kebijakan Publik*.Jakarta: Universitas Terbuka

Keban, Yeremias T. (2008), *Enam Dimensi Strategis Admnsitrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta.

Moleong, Lexy, 2007,*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy : Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Proses Kebijakan*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Smith, Kevin B. and Christopher W. Larimer, 2009, *the Public Policy Theory Primer*, Boulder: Westview Press.

Sunggono,Bambang.1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*.Jakarta: Sonar Grafika.

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Penerbit Pustaka Pelajar, Jogjakarta.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Penerbit Alfabeta Bandung.

Thohir, Mudjahirin, 2013,*Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*, Fasindo Press, Semarang.

Van, Meter, D. And Van Horn, C. 1975. "The policy Implementation Process: A Conceptual Framework" dalam *Administration and Society*, 6, 445-448

Widodo,Joko.2009.*Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Penerbit Media Pressindo. Yogyakarta.